

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kepentingan Nasional

Negara merupakan aktor yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengambil keputusan ketika melakukan interaksi atau kerjasama internasional dan akan berpengaruh bagi masyarakat yang ada di dalamnya. Setiap keputusan yang diambil oleh negara dalam kerangka kerjasama internasional dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, sosial hingga budaya. Keputusan politik luar negeri tersebut digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasional.

Kepentingan nasional merupakan sebuah konsep yang juga menjadi kebutuhan yang krusial dalam sebuah negara. Kepentingan nasional menjadi sebuah rujukan dalam kebijakan politik luar negeri.

“National interest is considered a key concept in foreign policy”
(Frankel, 1964)

Dalam memandu para pembuat keputusan untuk merumuskan dan menentukan politik luar negeri sebuah negara juga menggunakan kepentingan nasional. Maka, kebijakan luar negeri tak terpisahkan dari tujuan dan kepentingan nasional. Setiap negara memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing yang berangkat dari faktor seperti budaya, wilayah, iklim, karakter hingga sejarah nasionalnya. Kepentingan nasional ini yang akan mengantarkan suatu negara memenuhi

kebutuhan pada negaranya. Penentuan kepentingan nasional sama pentingnya dalam usaha perwujudannya.

Menurut Morgenthau dalam Mardiana (2020) bahwa kepentingan nasional dibagi ke dalam dua tingkat, pertama adalah kepentingan nasional primer di mana kepentingan nasional ini terkait dengan perlindungan terhadap identitas fisik, politik dan budaya serta keamanan dan keberlangsungan hidup suatu negara yang tidak segan dicapai melalui cara berperang sekalipun. Sedangkan kepentingan nasional sekunder adalah kepentingan yang masih dapat dinegosiasikan dengan negara lain. Dalam hal ini contohnya dapat dilakukan melalui kerjasama dan diplomasi antarnegara.

Sebagai landasan, pemahaman yang cermat tentang kepentingan nasional menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global yang kompleks. Kepentingan nasional merupakan landasan serta faktor yang paling dibutuhkan dan menjadi tujuan fundamental dan determinan utama yang menjadi pedoman bagi para pengambil keputusan suatu negara untuk merumuskan politik luar negeri.

“National interest is typically formulated to include several elements, comprising five key components: interdependence, territorial integrity, economic well-being, military security, and self-preservation.” (Plano & Olton, 1982).

Penjelasan terkait lima unsur tersebut disebutkan kembali dalam tulisan Saleh (2022), yaitu

1. *Independence*, merupakan sebuah bentuk dari suatu negara yang mampu terbebas dari jajahan, hegemoni, ataupun intervensi negara lain dalam hal ekonomi, teknologi, politik, militer sehingga dapat menyelenggarakan

pemerintahannya secara mandiri, efektif dan menentukan masa depannya dengan kemandirian.

2. *Territory Integrity*, merupakan prinsip yang penting bagi negara yang berdaulat untuk senantiasa mempertahankan baik perbatasan maupun seluruh wilayah di dalamnya dari ancaman negara lain. Negara dapat menjamin kesatuan yang berkesinambungan dan saling mendukung antar wilayah.
3. *Economic Well-Being*, kesejahteraan ekonomi yang dijadikan tujuan oleh suatu negara untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi dalam negaranya. Kesejahteraan ekonomi yang baik tidak hanya mempengaruhi stabilitas internal, tetapi juga mempengaruhi posisi dan daya tawar dalam hubungan internasional. Negara yang memiliki kesejahteraan ekonomi yang baik cenderung memiliki kekuatan lebih besar dalam diplomasi dan kerjasama internasional.
4. *Military Security*, keamanan militer yang mencerminkan kemampuan negara-bangsa mampu mempertahankan diri dan mencegah agresi militer. Dalam hal ini, kepentingan negara ditujukan untuk menjaga wilayah teritorinya dengan menilai dari kekuatan militernya. Keamanan militer menjadi faktor penting bagi suatu negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman dari pihak militer baik kelompok separatis dalam negeri atau kekuatan militer luar negeri.
5. *Self Preservation*, pertahanan diri yang merupakan faktor penting untuk mewujudkan eksistensi sebuah negara. Plano dan Olton menyebutkan

bahwa *self preservation* ini adalah tujuan fundamental yang harus dijaga oleh negara dalam menghadapi dinamika dan tantangan global. Dalam kebijakan politik luar negeri, *self preservation* menjadi faktor yang utama untuk dipertimbangkan oleh pembuat keputusan karena keberlangsungan hidup negara dianggap sebagai prioritas tertinggi.

Ketika merumuskan kepentingan nasional perlu untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan serta kapabilitas suatu negara yang kemudian tercakup dalam hal kekuasaan. Kekuasaan ini yang memainkan peranan penting dalam menjalankan strategi terhadap pencapaian kepentingan nasional. Kapabilitas negara dapat ditentukan dengan melihat ketahanan nasional dan kekuatan nasionalnya (Thrahastadie, 2019). Selain itu, terdapat faktor lain seperti sumber daya alam, posisi geografis, kemampuan ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia serta kekuatan diplomasi dan militer yang berperan dalam menentukan kapabilitas negara tersebut. Dengan pemahaman komprehensif tersebut akan membantu negara dalam merancang kebijakan yang efektif dan realistis untuk mencapai tujuan nasionalnya.

Kepentingan nasional diwujudkan dengan memperhatikan tiga kaidah pokok yaitu, pertama tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Kedua, pembangunan nasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berketahanan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan ketiga mendayagunakan sarana, potensi dan kekuatan nasional secara menyeluruh dan terpadu (KEMHAN, 2015). Dengan

memperhatikan kaidah-kaidah ini, suatu negara dapat mengoptimalkan upaya dalam mencapai kepentingan nasionalnya secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi dinamika global, kepentingan nasional harus disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis yang terus berkembang. Globalisasi, teknologi informasi, dan penggunaan energi secara global yang menjadi faktor yang dapat mempengaruhi sebuah negara memformulasikan dan mengejar kepentingan nasionalnya. Dengan mempertimbangkan hal tersebut suatu negara harus mampu memperbaharui strategi dan pendekatan untuk mencapai tujuan nasionalnya.

Sebagai contoh, Indonesia dalam ASEAN, melakukan upaya menjaga stabilitas regional dan memperkuat kerjasama ekonomi dengan negara anggota lainnya. Melalui ASEAN, Indonesia mampu menavigasi kepentingan nasionalnya, seperti stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika global yang kompleks. Posisi Indonesia dalam ASEAN pun menduduki posisi yang sangat berpengaruh dan memainkan peran kunci dalam membentuk dan mengarahkan organisasi ini. Sebagai hasilnya, Indonesia dipandang sebagai negara yang strategis untuk diajak bekerjasama dengan negara non-ASEAN.

Kepentingan nasional sering dianggap sebagai tujuan utama suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Dalam menjalin hubungan kerjasama, negara biasanya dapat membawa titik yang relevan yang mencerminkan tujuan-tujuan kerjasama tersebut. Dari hubungan kerjasama, kepentingan nasional muncul sebagai target utama, baik dalam konteks bilateral maupun multilateral. Namun, secara khusus, meskipun ada berbagai tujuan yang diusung, inti dari

melakukan hubungan kerjasama tersebut tetap berfokus kepada kepentingan nasional.

2.1.2. Energi Terbarukan

Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Energi terbarukan merujuk pada sumber energi yang dapat diperbaharui secara alami dan tidak akan kehabisan jika dikelola dengan baik (Haryanto, 2017). Sumber energi ini berasal dari berbagai unsur alam yang tersedia secara melimpah di bumi, seperti sinar matahari, angin, air sungai, dan vegetasi. Energi jenis ini adalah salah satu bentuk sumber energi yang paling ramah lingkungan dan dapat ditemukan di planet ini (Contained Energy Indonesia, 2016). Energi terbarukan berbeda dengan energi baru, definisi energi baru menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, bahwa energi baru adalah yang bersumber dari hasil teknologi baru baik dari sumber energi terbarukan maupun energi tak terbarukan seperti nuklir, hidrogen, gas metana serta batu bara. Maka, energi terbarukan lebih applicable dan lebih baik dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan. Energi terbarukan sebagai energi bersih dan ramah lingkungan perlu diprioritaskan sebagai tumpuan transisi energi di Indonesia (ICEL, 2022)

Indonesia memiliki jenis sumber energi terbarukan diantaranya sebagai berikut

1) Energi Surya

Energi surya adalah energi yang bersumber dari sinar matahari yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan manusia dan dapat dijadikan sebagai alternatif tenaga listrik.

2) Energi Angin

Energi angin adalah energi yang sumbernya berasal dari aktivitas Gerakan angin. Sumber energi angin diwujudkan dalam bentuk penggerak kincir angin untuk pembangkit listrik.

3) Energi Panas Bumi

Memiliki sumber energi dari dalam inti dalam bumi. Energi jenis ini dapat ditemukan pada beberapa wilayah yang dilalui cincin api pasifik (Janitra, 2022).

4) Energi Hidro

Pemanfaatan air sebagai sumber energi belum melimpah jumlahnya. Energi air dikonversikan melalui kincir air yang ditempatkan pada daerah yang memiliki arus kencang.

5) Energi Ombak dan Pasang Surut

Energi ini berasal dari laut yang dihasilkan dari gelombang pasang surut air laut. Pemanfaatan energi ombak dan pasang surut biasanya digunakan dalam berupa listrik.

6) Bioenergi

Energi jenis ini dihasilkan dari biomassa, termasuk produk yang dapat terurai secara biologis, limbah, dan sisa-sisa dari kegiatan pertanian yang mencakup baik sumber tanaman maupun hewan (Putri & Hadiyanto, 2013).

2.1.3. Konsep Kerjasama Internasional

Dalam pelaksanaan kenegaraan terdapat aktivitas interaksi antar negara-negara, di mana interaksi tersebut bisa berbentuk konflik yang menimbulkan perang atau sebuah kerjasama dalam organisasi internasional (Mas'oed, 1990). Namun, saat ini interaksi antar negara lebih erat dengan melakukan kerjasama internasional. Kerjasama internasional yang dilakukan oleh negara ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (Dai et al., 2010). Keuntungan yang didapat oleh masing-masing negara dapat terlihat saat keduanya mendapatkan timbal balik atau bisa disebut strategi *Tit for Tat*, di mana dalam konteks hubungan internasional, strategi ini menunjukkan bahwa negara-negara cenderung melakukan kerjasama jika mereka yakin bahwa tindakan positif akan dibalas dengan tindakan positif. Prinsip timbal balik ini dapat mendorong negara-negara untuk mematuhi kesepakatan dan meningkatkan pencapaian tujuan kerjasama (Kopelman, 2020). Dalam melakukan kerjasama para aktor saling mendapatkan keuntungan, tetapi dalam porsi yang berbeda, keuntungan yang didapat bergantung pada partisipasi negara dalam kerjasama. Hal ini terdapat pada penekanan perbedaan keuntungan yang diterima oleh negara sebagai bentuk *mutual benefit*.

Kerjasama internasional mampu terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti politik, ideologi, ekonomi, lingkungan hidup,

energi, sosial, kebudayaan, pertahanan dan keamanan. Kemudian, hal tersebut menimbulkan kepentingan yang sangat beragam dari masing-masing negara yang berakibat terjadinya masalah sosial. Masalah tersebut dapat menimbulkan usaha, tujuan bersama hingga akhirnya terbentuknya solusi atas berbagai masalah tersebut, beberapa negara dapat membentuk suatu kerjasama internasional (Pereira, 2020). Setelah mencapai kesepakatan bersama maka seluruh negara anggota harus mampu menjamin keberhasilan bersama.

Selanjutnya, menurut K. J. Holsti (1988) dalam Pereira (2020), definisi kerjasama internasional adalah sebagai berikut:

1. Suatu pandangan dua atau lebih kepentingan, nilai serta tujuan yang saling bertemu dan mampu menghasilkan sesuatu yang dapat dipromosikan atau dipenuhi oleh seluruh pihak sekaligus.
2. Suatu pandangan atau harapan dari suatu negara terkait kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya yang akan membantu negara tersebut untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
3. Proses persetujuan antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau berbenturan kepentingan.
4. Aturan resmi atau tidak resmi terkait transaksi di kemudian hari yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.
6. Kerjasama internasional terbagi menjadi dua yaitu kerjasama multilateral dan kerjasama bilateral. Pada hubungan kerjasama *Belt and Road Initiative* *Green Development Coalition* ini adalah multilateral karena melibatkan

banyak negara, tetapi memang dalam pelaksanaannya difokuskan kepada masing-masing negara yang diajak bekerjasama melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding*. Dalam dokumen tersebut tercantum kesepahaman antara Indonesia dengan Tiongkok di mana dalam pelaksanaan politik luar negerinya kedua negara tersebut mengabdikan kepada kepentingan nasionalnya masing-masing. Keduanya berhasil mendapatkan kesepakatan bersama.

2.1.4. Teori Interdependensi Kompleks

Terjadinya hubungan antar negara merupakan suatu keharusan sebagai akibat dari saling ketergantungan dan semakin kompleksnya kehidupan manusia dalam ruang lingkup internasional sehingga interdependensi tidak mampu dihindari oleh suatu negara. Robert Owen Keohane dan Joseph Samuel Nye, Jr. pada teori *complex interdependence* atau interdependensi kompleks yang menjelaskan bagaimana hubungan kerjasama yang diterapkan oleh para aktor yang melakukan kerjasama hubungan transnasional akan memperlihatkan semakin masifnya peningkatan pada kompleksitas hubungan kerjasama yang dijalin, ini akan berdampak pada kondisi sebuah negara dan terbentuknya hubungan saling ketergantungan karena meningkatnya kompleksitas kerjasama (Nye & Keohane, 1997). Dalam bukunya *Power and Interdependence* (1997), Nye menjelaskan ada tiga karakter dalam teori interdependensi kompleks diantaranya:

1. Adanya interaksi yang dilakukan oleh para aktor yang dapat menciptakan hubungan saling bergantung satu sama lain. Bukan hanya aktor negara

saja, tetapi juga aktor non-negara yang dianggap mampu memberikan pengaruhnya guna menciptakan sebuah kebijakan dalam pemerintah.

2. Kehadiran dari beberapa macam masalah yang tidak tersusun dalam hierarki yang jelas atau konsisten. Akibatnya banyak masalah yang muncul dari kebijakan dalam negeri, batasan antara masalah domestik dan luar negeri menjadi kabur.
3. Ketika ketergantungan kompleks semakin mendominasi, pemerintah tidak lagi menggunakan kekuatan militer kepada pemerintah lain dalam wilayah atau isu-isu tertentu karena dianggap tidak relevan dalam menyelesaikan perselisihan terkait masalah ekonomi, politik dan lingkungan,

Interdependensi kompleks dalam dunia politik adalah situasi yang ditandai dengan ditemukannya efek timbal balik antara negara ataupun aktor dari berbagai negara. Interdependensi kompleks tidak hanya dilihat hanya berdasarkan saling membutuhkan karena negara maju yang melakukan interdependensi tidak selamanya membutuhkan negara lain, begitu pun sebaliknya. Misalnya, dalam konteks ekonomi interdependensi kompleks mampu mencerminkan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan dan investasi lintas negara. Perubahan dalam kebijakan ekonomi suatu negara, seperti tarif perdagangan atau regulasi investasi dapat menimbulkan efek riak di seluruh dunia dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas pada negara lain.

Dalam interdependensi terdapat *power* yang menjadi faktor penting dalam mempengaruhi bentuk hubungan interdependensi. *Power*, *bargaining position* dan rezim internasional merupakan kemampuan yang dimiliki oleh negara untuk dapat

mempengaruhi negara lain agar bersedia untuk melakukan sesuatu yang negara tersebut inginkan. Penggunaan *power* oleh suatu negara dalam memperoleh keuntungan dalam interdependensi akan menimbulkan situasi yang dinamakan *asymmetrical interdependence*. *Asymmetrical interdependence* merupakan hubungan yang menunjukkan salah satu negara memiliki kekuasaan yang tidak setara dalam bidang politik, ekonomi dan budaya. Keadaan ini menyebabkan distribusi *power* kedua negara tidak seimbang dalam memperoleh keuntungan dan salah satunya memperoleh kerugian (Amistia, 2017).

Oleh karena itu, penulis menggunakan elemen *vulnerability of interdependence* yang memiliki beberapa indikator yaitu tingkat kemampuan negara dalam menggunakan sumber daya yang ada. Kemampuan ini melihat bagaimana suatu negara dapat menggunakan sumber daya energi berdasarkan kepada akses negara dalam pasar perdagangan dan dalam bidang finansial. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya energi terbarukan yang melimpah, akan tetapi belum dimaksimalkan dengan baik karena terkendala biaya, riset, teknologi dan sumber daya manusia yang mampu mengelolanya dengan baik.

Secara keseluruhan, memahami dan mengelola elemen *vulnerability of interdependence* merupakan kunci bagi setiap negara berkembang untuk mengamankan manfaat maksimal dari kerjasama internasional, juga meminimalkan potensi kerugian. Hal ini menuntut pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, yang mencakup penguatan kapasitas, peningkatan kerjasama internasional dan kebijakan yang senantiasa mendukung inovasi dan investasi di sektor-sektor kunci.

2.1.5. *Belt and Road Initiative Green Development Coalition (BRIGC)*

Belt and Road Initiative Green Development Coalition (BRIGC) yaitu koalisi yang didirikan oleh Kementerian Ekologi dan Lingkungan Tiongkok serta pihak-pihak internasional. Pembentukan BRIGC dilakukan pada *Second Belt and Road Forum for International Cooperation* yang dilaksanakan di Beijing pada tanggal 25-27 April 2019 (UNEP, n.d). BRIGC juga ditujukan untuk mengimplementasikan United Nations 30 SDGs dan kebutuhan untuk memenuhi komitmen negara-negara yang terlibat pada *Belt and Road Initiative* terhadap target *Paris Agreement* yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi lokal dan internasional, *think tank*, pihak swasta, masyarakat sipil, dan pemegang kepentingan lainnya untuk memaksimalkan upaya untuk pembangunan hijau. Menteri Ekologi dan Lingkungan Tiongkok menyebutkan bahwa pembangunan hijau dan berkelanjutan menjadi peranan penting dalam menyelesaikan isu global. BRIGC mengharuskan banyak negara yang terlibat untuk sadar dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam mewujudkan *Belt and Road Initiative* yang lebih hijau dengan menggunakan energi terbarukan memerlukan upaya yang lebih dari para pemegang kepentingan. Tiongkok memerlukan tindakan bersama untuk menerapkan filosofi bahwa gunung yang hijau dan air yang jernih adalah emas dan perak, serta mengejar visi ekologi global, sehingga mampu bersama-sama mewujudkan agenda SDGs 2030.

Belt and Road Initiative Green Development Coalition memiliki tujuan untuk mempromosikan dan mendorong pemahaman konsensus internasional, kerjasama, tindakan bersama untuk mencapai pembangunan ramah lingkungan dalam kerjasama *Belt and Road Initiative* untuk mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan dan memfasilitasi negara-negara yang bergabung dalam *Belt and Road Initiative*. Selain itu, BRIGC juga ingin menerapkan integrasi yang kuat antara elemen lingkungan dan pembangunan menggunakan SDGs.

Adapun yang tertera pada laman resmi *Belt and Road Initiative Green Development Coalition* memiliki tujuan dan fungsi dasar. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan keseimbangan ekologi serta mendorong kolaborasi internasional yang lebih luas dalam menghadapi tantangan lingkungan global. Adapun fungsi dasar terbagi menjadi tiga. Berikut fungsi dasar yang dimiliki oleh *Belt and Road Initiative Green Development Coalition*:

1. Fungsi Dasar

Belt and Road Initiative Green Development Coalition sebagai sarana dialog dan komunikasi dialog;

1. untuk berbagi konsep dan kebijakan pembangunan hijau;
2. untuk menyediakan peluang komunikasi di antara para pemangku kepentingan *Belt and Road Initiative*;
3. untuk membangun jaringan penelitian bersama guna memberikan dukungan dan rekomendasi kebijakan tentang pembangunan hijau bagi negara-negara peserta *Belt and Road Initiative*.

Belt and Road Initiative Green Development Coalition sebagai platform pengetahuan dan informasi lingkungan:

1. untuk berbagi pengetahuan dan data terkait konservasi ekologi, perlindungan lingkungan, dan pengendalian polusi;
2. untuk menyediakan data dan analisis data terkait pembangunan hijau *Belt and Road Initiative*;
3. untuk mempromosikan pembangunan kapasitas dalam manajemen lingkungan;
4. untuk meningkatkan kesadaran publik tentang lingkungan.

Belt and Road Initiative Green Development Coalition sebagai sarana pertukaran dan transfer teknologi hijau:

1. untuk memfasilitasi kerjasama internasional pada teknologi hijau guna meningkatkan pembangunan kapasitas dalam konservasi ekologi, aksi iklim, dan pencegahan serta pengendalian polusi;
2. untuk mempromosikan pertukaran dan transfer teknologi hijau dan rendah karbon yang maju guna mendorong investasi dalam infrastruktur hijau dan perdagangan.

2. Partisipasi

Para pemangku kepentingan *Belt and Road Initiative* yang menyetujui tujuan *Belt and Road Initiative Green Development Coalition* (BRIGC), termasuk pemerintah, badan pembangunan lokal dan internasional, lembaga pemikir, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan terkait lainnya yang bergabung sebagai mitra.

Mitra *Belt and Road Initiative Green Development Coalition* juga harus memenuhi persyaratan berikut:

1. memiliki catatan terbukti dalam pembangunan berkelanjutan untuk negara-negara peserta *Belt and Road Initiative*;
2. berkomitmen untuk memberikan kontribusi pada *Belt and Road Initiative* hijau dan implementasi SDGs;
3. bersedia memberikan kontribusi finansial, intelektual dan/atau kontribusi dalam bentuk lain untuk mendukung operasi dan kegiatan inti *Belt and Road Initiative Green Development Coalition*.

Dalam mitra *Belt and Road Initiative Green Development Coalition* terdapat prinsip dasar:

1. saling menghormati;
2. mencari kerjasama dan manfaat bersama;
3. keterbukaan dan transparansi.

Belt and Road Initiative Green Development Coalition dalam *Belt and Road Initiative* berperan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. BRIGC berperan sebagai wadah pelengkap dari pembangunan *Belt and Road Initiative Green Development Coalition*. BRIGC menjadi sarana untuk para negara yang tergabung dalam BRI dan para mitra lainnya. Secara rinci berikut adalah peran *Belt and Road Initiative Green Development Coalition* (BRIGC) dalam *Belt and Road Initiative* (BRI):

meningkatkan standar lingkungan dalam proyek *Belt and Road Initiative*, dalam peran ini BRIGC memastikan bahwa proyek-proyek *Belt and Road Initiative*

dapat mematuhi standar lingkungan yang tinggi dengan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek seperti mempertimbangkan rambu-rambu pelaksanaan proyek sebelum dieksekusi;

mendorong partisipasi *Belt and Road Initiative* menggunakan energi terbarukan, mempromosikan penggunaan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, air, biomassa dalam proyek-proyek *Belt and Road Initiative* untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan mempertegas bahwa Tiongkok negara pencetus BRI telah berkomitmen untuk menghentikan proyek pembangunan menggunakan batu bara;

membantu negara-negara *Belt and Road Initiative* mengelola dampak lingkungan, BRIGC menyediakan dukungan teknis dan berbagi praktik terbaik untuk membantu negara-negara yang terlibat dalam proyek BRI mengelola dampak lingkungan dari proyek-proyek infrastruktur;

mendorong kerjasama internasional dalam isu lingkungan, dalam hal ini BRIGC memfasilitasi kerjasama antara berbagai negara dalam BRI untuk menangani isu-isu lingkungan bersama, berbagi teknologi hijau, dan solusi inovatif. Kerjasama Tiongkok dengan negara ASEAN salah satunya Indonesia terhadap transisi hijau dan rendah karbon berada pada titik peluang yang sangat besar. Pada *Action Plan for Carbon Dioxide Peaking Before 2030* yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok, perencanaan keseluruhan pekerjaan diperlukan untuk menjadikan proyek BRI sebagai inisiatif yang ramah lingkungan untuk memperkuat kerjasama dengan negara lain di bidang

infrastruktur ramah lingkungan dan keuangan ramah lingkungan sehingga peran BRIGC dan *Green Investment Principle* akan memainkan peran penuh; mengembangkan kebijakan sesuai dengan standar keberlanjutan, dalam hal ini BRIGC bekerja untuk mengembangkan kebijakan dan standar penilaian lingkungan dan sosial yang menjadi syarat untuk diterapkan dalam proyek-proyek BRI agar memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak merusak lingkungan (BRIGC, 2021).

Dilansir dari *report* yang dikeluarkan oleh BRIGC, inisiatif ini memiliki prinsip memperluas konsultasi, kontribusi dengan kolaborasi dan membagikan manfaat seluas-luasnya. Tiongkok memusatkan BRIGC pada penyelarasan kebijakan, peningkatan konektivitas infrastruktur, integrasi finansial, dan penguatan hubungan antar masyarakat. Dengan kapasitas kerjasama yang sangat besar, BRIGC memiliki mekanisme kerja dan koordinasi antar negara anggota serta minta organisasi yang bergerak dan berfokus pada energi terbarukan.

Dalam kerjasama BRIGC, koordinasi kebijakan menjadi jaminan dan syarat utama sebelum melakukan tindakan terkait. Selama lebih dari lima tahun, Tiongkok telah membangun pola komunikasi dan koordinasi dengan negara-negara partisipan dan organisasi internasional, mencapai kesepakatan dalam kerjasama internasional untuk mendukung BRI (Foreign Languages Press, 2019).

Mekanisme kerja dan koordinasi BRIGC melibatkan beberapa langkah diantaranya:

1. koordinasi antar pemerintah, tepat 150 negara telah menjadi partisipan dalam BRI yang secara otomatis tergabung dalam BRIGC bersama

mitra organisasi lainnya. Pada tingkat bilateral Tiongkok menerapkan koordinasi antar pemerintah terhadap keikutsertaan negara-negara partisipan BRI dan BRIGC hal ini dapat terlihat dalam mekanisme kerja dan koordinasi melalui strategi yang digunakan oleh Tiongkok, seperti *Build Better More Plan* milik Filipina dan *New Energy Vehicle Cooperation Held* di Thailand. Melalui *high-level dialogues* Tiongkok dan negara partisipan mengintegrasikan kerjasama yang akan disepakati meliputi tantangan dan hambatan atas standar yang telah ditetapkan, pertemuan ini akan berlanjut hingga terlaksananya proyek. Selanjutnya akan dibentuk *intergovernmental committees* yang beranggotakan komite yang sengaja ditugaskan untuk mengawal kerjasama yang telah disepakati antara Tiongkok dengan negara partisipan

2. pendanaan dan pembiayaan, pada proses ini BRIGC menggunakan pedoman pembangunan ramah lingkungan kerangka kerja aksi “1+9” untuk menjadi standar lolos atau tidaknya proyek yang akan didanai. Kerangka kerja pendanaan World Bank ini berfokus pada risiko iklim dan lingkungan yang dihasilkan dari pembangunan proyek tersebut. Proses pendanaan proyek di luar negeri mencakup pengawasan, pengecualian terhadap proyek yang merugikan, penilaian terhadap dampak lingkungan, perbedaan pengelolaan, *environmental and social standard*, penanganan krisis, perjanjian, pelaporan dan pengungkapan, dan kerjasama internasional. Negara partisipan harus mengikuti ketentuan jalur yang sudah dibuat agar berbagai pihak yang terlibat

dalam pendanaan proyek di luar negeri dapat mengurangi resiko lingkungan, menurunkan biaya pelaksanaan proyek, mempercepat perizinan proyek dan mempercepat kerjasama internasional pada seluruh tahapan proyek. Dalam gambaran umum dana investasi dan kerjasama luar negeri Tiongkok dan ASEAN dimiliki oleh Exim Bank of China sebagai pemegang saham mayoritas, dengan investasi utama dalam infrastruktur, energi dan sumber daya alam investasi di wilayah ASEAN. Selain itu, dana kerjasama investasi Tiongkok dan ASEAN bekerjasama dengan International Finance Corporation (ICF), Asian Infrastructure Investment Bank, Asian Development Bank, dan Bank Dunia (World Bank)

3. regulasi dan standar, seperti yang sudah dituliskan di atas bahwa BRIGC memiliki regulasi dan standar terhadap proyek yang akan didanai, mulai dari aspek lingkungan hingga sosial. *Traffic light* dan skema “1+9” dijadikan *tools* untuk menilai dan mengklasifikasikan apakah proyek akan berdampak baik pada lingkungan atau hanya menimbulkan resiko yang fatal terhadap lingkungan dan sosial
4. forum multilateral, melihat ke belakang bahwa BRIGC diperkenalkan pada tahun 2019 hingga pada akhirnya BRIGC menjadi inisiatif dalam mega proyek BRI yang dipertimbangkan oleh banyak negara. Hal ini memastikan bahwa keberhasilan BRIGC juga bergantung pada mekanisme dan koordinasi yang baik antar negara melalui pertemuan yang penting seperti forum, konferensi, kerjasama organisasi

internasional. Tiongkok mengandalkan *network* untuk merawat keberhasilan mega proyeknya (BRIGC, 2021).

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis membuat kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ditujukan sebagai landasan untuk membantu peneliti dalam melakukan dan menyusun penelitian. Sehingga kerangka pemikiran ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran atau konsep yang akan diteliti, dikaji.

Keberlimpahan sumber daya alam dan potensi energi terbarukan Indonesia memunculkan adanya kepentingan nasional untuk melaksanakan transisi energi ke energi terbarukan. Kepentingan nasional tersebut yaitu *self preservation* dan *economic well being*. Kepentingan nasional tersebut sebagai bentuk upaya pada kerjasama energi terbarukan *Belt and Road Initiative Green Development Coalition* (BRIGC). Kerjasama ini dibentuk oleh Tiongkok yang memiliki peran besar pada kerjasama ini.

Melalui teori interdependensi kompleks, kerangka berpikir ini menjelaskan bahwa hubungan antara Indonesia dan Tiongkok dalam kerjasama BRIGC saling mempengaruhi dan bergantung satu sama lain untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing. Mekanisme interdependensi ini mencerminkan bagaimana kedua negara dapat mencapai tujuan mereka melalui kerjasama yang saling menguntungkan. Namun, ditemukan bahwa dalam interdependensi kompleks antara Tiongkok dan Indonesia, *power* yang dimiliki Tiongkok lebih besar sehingga menimbulkan *power asymmetry*, selain itu efek lingkungan dan

sosial serta ekonomi yang ditimbulkan dari kerjasama ini tidak 50:50 sehingga terciptanya *asymmetrical interdependence*. Tiongkok lebih mendapatkan keuntungan.

Penelitian ini ditujukan untuk memahami kepentingan Indonesia dan interdependensi *asymmetrical* dengan menggunakan elemen *vulnerability of interdependence* yang terjalin dalam kerjasama energi terbarukan dalam kerangka *Belt and Road Initiative Green Development Coalition* yang diusung oleh Tiongkok.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

